

## Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia

<sup>1</sup>Rizki Erdayani, Muslim Afandi, Syed Agung Afandi

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia; muslim.afandi@uin-suska.ac.id

*Received: April 10, 2023; In Revised: June 13, 2023; Accepted: August 15, 2023*

### Abstract

This study aims to analyze the bibliometrics of Indonesia's education decentralization policy. This study uses a qualitative approach with bibliometric analysis methods. The research data was obtained from the Google Scholar database using the Publish or Perish application with the keyword "Indonesian education decentralization". The data obtained was then analyzed using the Vosviewer application. The results of this study indicate that studies on the decentralization of education in Indonesia fluctuate. This is in line with the trend of global education decentralization studies. In the period 2012–2022, 90 papers on the decentralization of Indonesian education have been cited 231 times. The study also obtained a citation score per year of 21, citations per paper of 2.36, an h-index of 8, and a g-index of 12. The highest publication was in 2019, while the lowest was in 2020. There are a total of 115 keywords, which are divided into 22 clusters, with 1137 total link strengths and 362 occurrences. Indonesia's education decentralization policy is one of the impacts of post-reform governance changes in 1998. In practice, authority in the field of education in Indonesia is currently not only in the hands of the central government but also under the authority of local governments and educational institutions as implementing units. It can be concluded that local governments and educational institutions are actors who have discretion in managing education according to their respective conditions after the government reform in Indonesia.

**Keywords:** Local Government, Decentralization, Public Policy, Indonesian Education

### Pendahuluan

Pemerintahan di Indonesia telah bergeser dari model sentralisasi ke desentralisasi sebagai dampak dari reformasi (Afandi, Afandi, & Anugerah, 2023). Perubahan ini dimaksudkan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri, meningkatkan potensi daerah, dan memberikan kekuatan lebih besar kepada masyarakat lokal sehingga dapat mengelola dan melaksanakan pembangunan dengan lebih fleksibel (Afandi & Afandi 2018; Afandi, Afandi, & Erdayani 2022). Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999, berbagai kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, seperti urusan pendidikan, telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Kesadaran bahwa birokrasi di tingkat pusat cenderung mengatur pengelolaan pendidikan yang lebih berorientasi input dan makro berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan nasional merupakan landasan otonomi di bidang pendidikan (Afandi, Erdayani, Afandi, & Rafi, 2022)

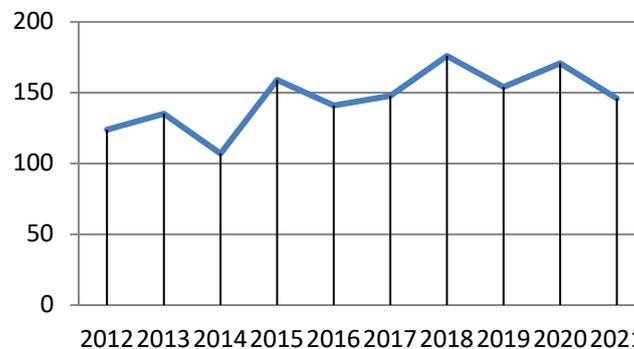
Pendidikan merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam pembangunan suatu bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan dan fasilitas serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia berupaya mengembangkan

potensi peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri, serta membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Ridwan & Sumirat, 2021). Penerapan urusan pendidikan yang terpusat telah menghancurkan inisiatif lokal sehingga memerlukan pendekatan desentralisasi yang konsisten dengan norma-norma demokrasi. Mengadaptasi model pengelolaan pendidikan terpusat ke desentralisasi diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang berkembang dengan pesat.

Studi desentralisasi pendidikan selalu menarik minat para peneliti dari berbagai negara dalam usahanya untuk mengembangkan model manajemen pendidikan yang paling sempurna. Studi desentralisasi pendidikan global telah menjadi subyek 1.461 publikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Gambar 1 merupakan tren global dalam publikasi studi desentralisasi pendidikan.

Gambar 1

Tren Global Studi Desentralisasi Pendidikan



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Paper desentralisasi pendidikan yang diterbitkan selama satu dekade terakhir bervariasi, rata-rata 146,1 publikasi setiap tahunnya. Tahun dengan publikasi tertinggi yakni 2018 sedangkan tahun dengan publikasi terendah yakni 2014. Secara keseluruhan, pada tahun 2012 terdapat 144 publikasi, tahun 2013 terdapat 135 publikasi, tahun 2014 terdapat 107 publikasi, tahun 2015 terdapat 159 publikasi, tahun 2016 terdapat 141 publikasi, tahun 2017 terdapat 148 publikasi, tahun 2018 terdapat 176 publikasi, tahun 2019 terdapat 154 publikasi, tahun 2020 terdapat 171 publikasi, dan tahun 2021 terdapat 146 publikasi. Pola-pola tersebut di atas, meskipun fluktuatif, tetap menunjukkan ketertarikan para peneliti dari banyak negara melakukan studi desentralisasi pendidikan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis bibliometrik. Metode ini digunakan untuk menyoroti wawasan kritis yang dihasilkan dari literatur ilmiah (Afandi, Afandi, Erdayani, & Afandi, 2023; Afandi, Erdayani, & Afandi, 2023). Penelitian ini mengacu pada literatur ilmiah yang diperoleh dari database Google Scholar. Untuk memperoleh data tersebut, penelitian ini menggunakan aplikasi Publish or Perish, dengan keyword “desentralisasi pendidikan Indonesia”. Data yang terkumpul berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Data yang diperoleh kemudian disimpan dalam format file RIS, diimport ke aplikasi Mendeley untuk melengkapi bagian keyword, dan dianalisis menggunakan Vosviewer untuk mendapatkan peta bibliometrik yang bersumber dari keyword dalam literatur ilmiah yang digunakan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode

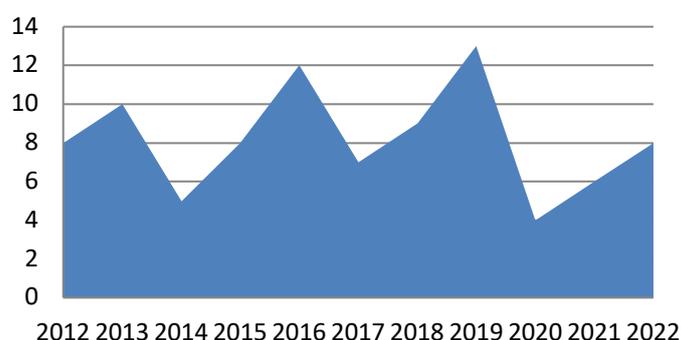
analisis konten dengan sumber data yang sama, dengan terlebih dahulu melakukan klasifikasi dan eliminasi data.

### Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan Indonesia telah lama membangkitkan rasa ingin tahu akademis para analis. Terdapat total 90 paper dalam rentang waktu 2012–2022, 231 kutipan, 21 kutipan per tahun, 2,36 kutipan per paper, indeks-h 8, dan indeks-g 12 pada database Google Scholar. Gambar 2 memvisualisasikan tren publikasi studi desentralisasi pendidikan Indonesia.

Gambar 2

Tren Publikasi Studi Desentralisasi Pendidikan Indonesia

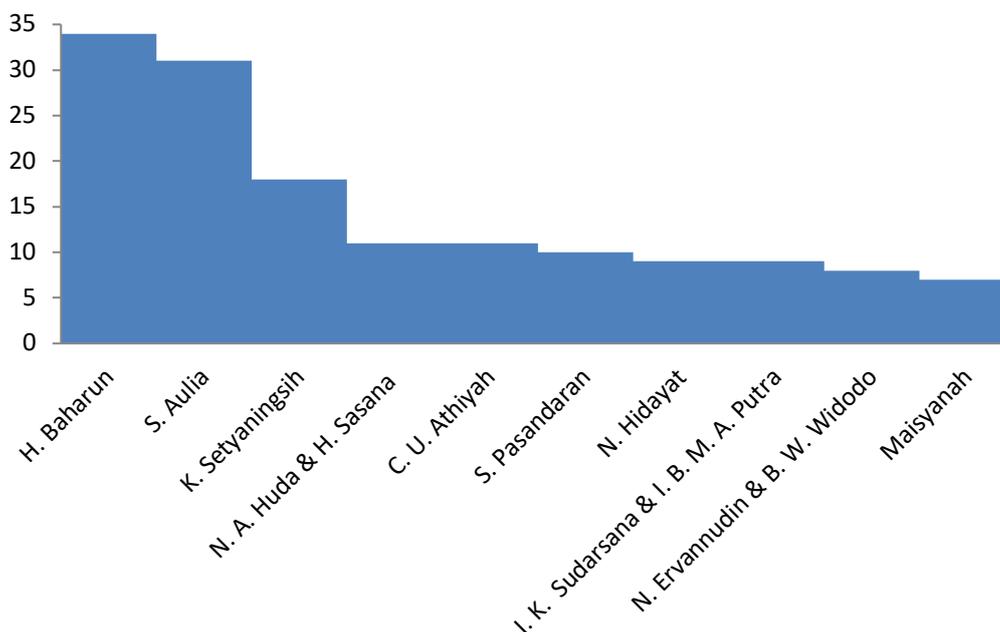


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Publikasi studi desentralisasi pendidikan Indonesia berfluktuasi selama satu dekade terakhir. Publikasi terendah terdapat pada tahun 2020, sedangkan tertinggi terdapat pada tahun 2019. Setelah adanya peningkatan publikasi di tahun 2018 dan 2019, terjadi penurunan signifikan di tahun 2020. Namun demikian, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Secara keseluruhan, terdapat delapan publikasi paper desentralisasi pendidikan Indonesia pada tahun 2012, 2015, dan 2022, sepuluh publikasi pada tahun 2013, lima publikasi pada tahun 2014, dua belas publikasi pada tahun 2016, tujuh publikasi pada tahun 2017, sembilan publikasi pada tahun 2018, tiga belas publikasi pada tahun 2019, empat publikasi pada tahun 2020, dan enam publikasi pada tahun 2021.

Sitasi pada paper desentralisasi pendidikan Indonesia didominasi oleh topik pendidikan Islam. Paper dengan topik esensi pendidikan dalam pengembangan masyarakat dan kebijakan wajib belajar juga mendapat banyak sitasi. Dominasi paper pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh persentase penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan meningkatnya tren hijrah selama satu dekade terakhir, yang keduanya mempengaruhi munculnya banyak lembaga pendidikan Islam dan meningkatnya minat masyarakat untuk masuk ke lembaga pendidikan Islam (Baharun, 2012; Naim, 2014; Setyaningsih, 2017). Gambar 3 menampilkan penulis yang memperoleh jumlah sitasi tertinggi.

Gambar 3  
Penulis Dengan Jumlah Sitasi Tertinggi



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Sepuluh paper desentralisasi pendidikan Indonesia teratas mendapat 148 sitasi dari total 231 sitasi. Rincian penulis dengan sitasi terbanyak yakni: Baharun 34 sitasi, Aulia 31 sitasi, Setyaningsih 18 sitasi, Huda dan Sasana 11 sitasi, Athiyah 11 sitasi, Pasandaran 10 sitasi, Hidayat, Sudarsana, dan Putra 9 sitasi, Ervannudin dan Widodo 8 sitasi, dan Maisyanah 7 sitasi. Judul paper yang paling sering dikutip adalah desentralisasi pendidikan dan implikasinya terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam; desentralisasi pendidikan (kajian pelaksanaan wajib belajar di kota Surabaya); hakikat transformasi sistem pendidikan sentralisasi-desentralisasi dalam pengembangan masyarakat; analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap hasil layanan pendidikan (studi kasus: DKI Jakarta); penerapan manajemen berbasis sekolah sebagai alternatif desentralisasi pendidikan di MAN 4 Jakarta; desentralisasi pendidikan dan isu pemberdayaan sekolah; otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan (studi di Kota Sawahlunto); peran keluarga dan masyarakat dalam desentralisasi pendidikan; desentralisasi pendidikan dan peran masyarakat menuju pendidikan bermutu; dan analisis dampak desentralisasi pendidikan dan relevansi manajemen berbasis sekolah. Tabel 1 merupakan daftar seluruh keyword pada paper desentralisasi pendidikan Indonesia.

Tabel 1  
Keyword Desentralisasi Pendidikan Indonesia

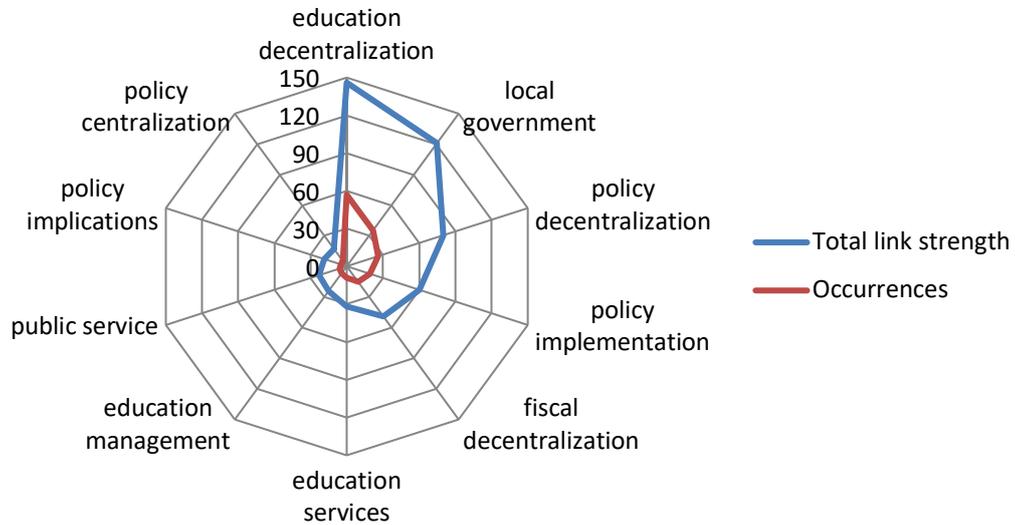
Cluster	Item
1	community development, community role, curriculum, diversification, education quality, family role, organizing education, policy centralization, policy transformation, relevant education
2	basic education, education politics, educational autonomy, educational gap, elementary school, middle education, policy decentralization, policy response, quality planning
3	budget abuse, budget efficiency, budgeting policy, conflict management, decentralization conflict, decentralization influence, education budgeting, financing management, public welfare
4	budget spending, decentralization effect, education services, junior high school, literacy, professionalism development, public service, school participation, teacher professionalism
5	education management, educational leadership, institution quality, integration, local wisdom, quality improvement, society participation
6	decentralization development, decentralization potential, decentralized politics, educational development, human resources, Islamic education, policy implications
7	academic atmosphere, impact analysis, policy alternatives, policy effectiveness, policy relevance, school based management, senior high school
8	education authorities, opportunities and challenges, organizational capacity, policy constraints, policy implementation, policy review, regional autonomy
9	decentralization degree, education disparity, educational accessibility, government performance, influence analysis, local government
10	education decentralization, education equality, local history, modern education, religious education, teacher management
11	compulsory education, education policy, local regulation, special autonomy, teacher provision, vocational education
12	border area, decentralization impact, development equality, gender, human development index
13	decentralization synergy, decentralized impact, education, fiscal decentralization, village education
14	corruption, political problems, power politics
15	policy impact, politicization, teachers duty
16	policy urgency, salary, teacher motivation
17	education challenge, educational opportunities, malay community
18	local politics, political dynamics
19	educational performance, regional capacity
20	policy issue, school empowerment
21	affecting factors, teacher income
22	student admission, zoning system

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023



Gambar 5

Total Link Strength dan Occurrences Desentralisasi Pendidikan Indonesia

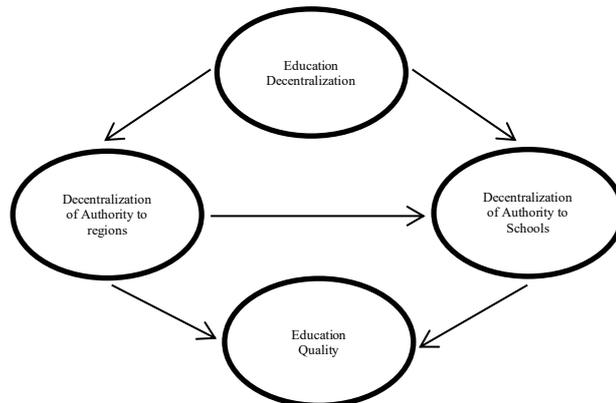


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Ada total 1137 total link strengths dan 362 occurrences dari 115 keyword paper desentralisasi pendidikan Indonesia. Desentralisasi pendidikan menjadi keyword yang mendapatkan skor tertinggi (146 total link strengths dan 57 occurrences). Keyword yang juga mendapat skor tinggi yakni kapabilitas pemerintah daerah (total link strengths 121 dan occurrences 35); desentralisasi kebijakan (total link strength 80 dan occurrences 26); implementasi kebijakan (total link strength 60 dan occurrences 19); desentralisasi fiskal (total link strength 49 dan occurrences 15); layanan pendidikan (total link strength 32 dan occurrences 9); manajemen pendidikan (total link strengths 24 dan occurrences 7); layanan publik (total link strengths 23 dan occurrences 6); implikasi kebijakan (total link strengths 19 dan occurrences 5); dan sentralisasi kebijakan (total link strengths 17 dan occurrences 5). Sepuluh keyword di atas mendominasi skor total link strengths dan occurrences pada paper desentralisasi pendidikan Indonesia. Total skor dari sepuluh keyword di atas yakni 571 total link strengths dan 184 occurrences. Total link strengths menunjukkan total kekuatan link dari suatu keyword, sedangkan occurrences menunjukkan total kemunculan suatu keyword di semua paper (Safarov, 2019). Keyword dengan tahun terbitan terbaru dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 7  
Model Desentralisasi Pendidikan Indonesia



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah local bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan (Sudarsana & Putra, 2018; Sutapa & Purwanto, 2012). Melalui kebijakan ini pemerintah local berhak untuk menentukan arah kebijakan pendidikan di wilayahnya, termasuk dalam penganggaran. Meski demikian, kewenangan ini dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada lembaga pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran (Afandi & Anwar, 2017; Hidayat, 2016). Lembaga pendidikan diberi keleluasaan dalam melakukan manajemen pendidikan yang meliputi manajemen perencanaan dan evaluasi program, manajemen proses belajar, manajemen guru, manajemen sarana dan prasarana, manajemen siswa, dan hubungan sekolah dengan pihak luar.

Desentralisasi pendidikan yang dilakukan di Indonesia merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan di Indonesia meliputi proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah local dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan kepada lembaga pendidikan.

### **Pelimpahan Wewenang Kepada Pemerintah Local**

Desentralisasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat local dengan tujuan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik (Handayani, 2017; Larasati & Saputra, 2014; Sutjipto, 2015). Otonomi daerah di Indonesia direalisasikan dengan membagi kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat dengan mendelegasikan sebagian dari tugas dan kewenangan tersebut kepada pemerintah lokal. Kewenangan yang masih menjadi milik pemerintah pusat saat ini meliputi kewenangan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (Ervannudin & Widodo, 2016; Maisyanah, 2018).

Kewenangan pada bidang pendidikan dan kebudayaan, pertanahan, pertanian, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, koperasi dan UKM, dan penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya telah

menjadi milik pemerintah lokal dengan berlakunya otonomi daerah. Pemerintah local juga diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Huda & Sasana, 2013; Pasandaran, 2016).

Pelimpahan kewenangan pada bidang pendidikan berarti pemerintah local bertanggungjawab dan memiliki hak untuk mengatur urusan bidang tersebut agar sesuai dengan jatidiri daerah. Dalam hal ini pemerintah local memiliki wewenang dalam merumuskan, melaksanakan, melakukan supervise, dan mengevaluasi kebijakan. Meski demikian pemerintah local tetap harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pemerintah Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dengan mengalokasikan setidaknya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelimpahan Wewenang Kepada Lembaga Pendidikan**

Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku (Athiyah, 2019; Aulia, 2012; Saputra, Firman, & Ahmad, 2022). Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan komite sekolah mengelola kegiatan pendidikan di sekolah. Manajemen berbasis sekolah diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan kepada sekolah dalam upaya perbaikan kinerja yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen berbasis sekolah diterapkan dengan memberdayakan seluruh potensi dan stakeholder sesuai kebijakan pemerintah.

Manajemen berbasis sekolah memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan melalui pemberdayaan sumber daya dan partisipasi masyarakat untuk mencerminkan upaya peningkatan pelayanan pendidikan yang demokratis, transparan, dan akuntabel tanpa mengesampingkan tujuan Pendidikan Nasional. Manajemen berbasis sekolah di Indonesia berdasarkan pada prinsip kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi, dan akuntabilitas (Achmad & Hartono, 2021; Bida, 2021). Dalam pelaksanaannya, strategi pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didik (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), berbasis IT, dan membentuk karakter (Idris, 2020; Iskandar, 2021). Fungsi-fungsi sekolah yang awalnya dikerjakan oleh pemerintah sebagian telah didesentralisasikan kepada sekolah untuk dilaksanakan secara profesional.

Hal tersebut berarti terdapat fungsi-fungsi tertentu yang tidak dilimpahkan kepada sekolah sepenuhnya, sebagian masih merupakan porsi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah local. Fungsi-fungsi yang porsinya digarap oleh sekolah dalam kerangka manajemen berbasis sekolah meliputi manajemen proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelayanan peserta didik, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan pengelolaan iklim sekolah (Kader & Kader, 2019; Rihardi & Yusliwidaka, 2020).

### Simpulan

Studi desentralisasi pendidikan menjadi tren global hingga saat ini. Dalam rentang waktu satu dekade terakhir, terdapat 1461 studi yang dipublikasikan. Selaras dengan tren tersebut, studi desentralisasi pendidikan Indonesia menarik minat para peneliti, meskipun publikasinya fluktuatif. Dalam rentang waktu 2012-2022 terdapat 90 publikasi dan 231 sitasi. Pada paper tersebut terdapat 115 keyword, 22 cluster, 1137 total link strength, dan 362 occurrences. Keyword dengan perolehan skor tertinggi yakni desentralisasi pendidikan, kapabilitas pemerintah daerah, desentralisasi kebijakan, implementasi kebijakan, desentralisasi fiskal, pelayanan pendidikan, manajemen pendidikan, pelayanan publik, implikasi kebijakan, dan sentralisasi kebijakan. Sedangkan keyword dengan kategori tahun publikasi terbaru yakni kapabilitas pemerintah daerah, sistem zonasi, manajemen konflik, potensi desentralisasi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Desentralisasi pendidikan Indonesia merupakan merupakan produk reformasi. Pendidikan dengan system sentralistik dinilai sebagai penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan Indonesia secara nasional sehingga dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan bidang pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah local dan lembaga pendidikan. Melalui kebijakan ini pemerintah local memiliki wewenang dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan di daerah. Sedangkan lembaga pendidikan memiliki kewenangan dalam manajemen pembelajaran dan kelembagaan. Desentralisasi pendidikan Indonesia di desain untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah local, dan lembaga pendidikan yang menuntut ketiganya berkolaborasi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

### Referensi

- Achmad, H., & Hartono, S. (2021). Manajemen Pendidikan: Desentralisasi dan Kepemimpinan Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 321–339.
- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Afandi, M., Erdayani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analysis of Education Autonomy Policy in Indonesia. *Journal of Government Science*, 3(2), 85–99.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Anugerah, M. F. (2023). *Open Government*. Kediri: Erye Art.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

- Afandi, S. A., Afandi, M., Erdayani, R., & Afandi, N. H. (2023). Indonesia's Open Government: A Bibliometric Analysis. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1–23.
- Afandi, S. A., & Anwar, K. (2017). Governability Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 18 Pekanbaru Tahun 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 31–48.
- Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, M. (2023). Open Government: A Bibliographic Study of The Semarang and Gwangju Experiences. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 217–234.
- Alaydrus, A. K. (2015). Pengembangan Profesionalisme Guru di Era Desentralisasi Pendidikan. *Palapa*, 3(2).
- Athiyah, C. U. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(1), 229–241.
- Aulia, S. (2012). Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 67–77.
- Baharun, H. (2012). Desentralisasi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid*, 1(2).
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian*, 9(1), 341–352.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to Conduct A Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 133(4), 285–296.
- Dorizaa, S., Purwanto, D. A., & Maulidaa, E. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(1).
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Indonesian Education Autonomy: A Bibliographic Study. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2).
- Erdayani, R., Afandi2, M., & Afandi, S. A. (2023). Bibliometric Analysis of Open Government: A Study on The Open Government Partnership. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2).
- Ervannudin, N., & Widodo, B. W. (2016). Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Penelitian*, 10(1).
- Gaviria-Marin, M., Merigó, J. M., & Baier-Fuentes, H. (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 140(12), 194–220.
- Ham, J., Koo, Y., & Lee, J. N. (2019). Provision and Usage of Open Government Data: Strategic Transformation Paths. *Industrial Management and Data Systems*, 119(8), 1841–1858.
- Handayani, D. (2017). Konflik Desentralisasi di Bidang Pendidikan Terhadap Penyalahgunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1).

- Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan: (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto). *2016*, 4(1).
- Huda, N. A., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1).
- Idris, I. (2020). Perencanaan Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2), 66–79.
- Ishak, D. (2022). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Papatung*, 5(1).
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 5(1), 115–125.
- Kader, K., & Kader, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Pengintegrasian Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Bentuk Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan. *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*, 3(1), 162–171.
- Larasati, D., & Saputra, H. (2014). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan di Indonesia Periode Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal. *Jurnal BPPK*, 7(1).
- Lnenicka, M., & Saxena, S. (2021). Re-Defining Open Government Data Standards for Smart Cities' Websites: A Case Study of Selected Cities. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(4), 398–411.
- Maisyannah. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan dan Relevansi School Based Management. *Quality Journal of Empirical Research in Islamic Education*, 6(2).
- Naim, Z. (2014). Implikasi Desentralisasi Pendidikan Pada Pengembangan Pendidikan Islam. *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Pasandaran, S. (2016). Desentralisasi Pendidikan dan Masalah Pemberdayaan Sekolah. *Pasandaran*, 11(2).
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter Jawara*, 7(1).
- Rihardi, S. A., & Yusliwidaka, A. (2020). Menakar Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru di Era Desentralisasi Pendidikan. *Vox Edukasi*, 11(1), 354–365.
- Safarov, I. (2019). Institutional Dimensions of Open Government Data Implementation: Evidence from the Netherlands, Sweden, and the UK. *Public Performance and Management Review*, 42(2), 305–328.
- Saputra, I., Firman, F., & Ahmad, R. (2022). Penerapan Desentralisasi Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah dari Pola Lama (Sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke Pola Baru (Era Desentralisasi). *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian*, 10(2).
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2022). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2).
- Schnell, S. (2020). Vision, Voice, and Technology: Is There a Global “Open Government” Trend? *Administration and Society*, 52(10), 1593–1620.

- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1).
- Sudarsana, I. K., & Putra, I. B. M. A. (2018). Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional. *Maha Widya Bhuwana*, 1(1).
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2).
- Surya, I., Budiman, Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Agregasi*, 9(1).
- Sutapa, M., & Purwanto, N. A. (2012). Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1).
- Sutjipto. (2015). Diversifikasi Kurikulum Dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3).